Gelojoh Para Penguasa Kursi dan Surutnya Kepublikan

IN NUGROHO BUDISANTOSO

"Freeport jalan. Bapak itu *happy*. Kita ikut *happy*. Kumpul-kumpul, kita golf. Kita beli *private jet* yang bagus dan representatif."

Kata-kata ini muncul pada rekaman percakapan antara Ketua DPR, Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin (yang merekam pembicaraan), terkait kemungkinan perpanjangan kontrak usaha pertambangan di Papua, yang sedang berada dalam proses negoisasi antara Pemerintah Indonesia dan Freeport. Dalam rekaman yang diputar pada gelaran sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu ada permintaan saham yang diperuntukkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Klaim permintaan saham dibantah pemerintah dan Setya Novanto mundur dari jabatannya pada tanggal 16 Desember 2015.

Ketika penggalan percakapan pejabat tinggi negara semacam itu terdengar, terbayangkan bagaimana gaya hidup mewah sudah perilaku harian mereka. Ungkapan "kita beli *private jet* yang bagus dan representatif" adalah semacam deklarasi identitas super-elitis. Sementara itu, konteks "di balik tirai" dari percakapan itu memberi isyarat bahwa ketidakpatutan tindakan sebenarnya sudah dikenali oleh yang terlibat. Namun, karena ada pejabat publik di situ maka peristiwanya diskenariokan untuk diketahui mereka saja, termasuk kalau kemudian dari percakapan rahasia itu dihasilkan *deal-deal* "bengkok" yang akan dicarikan jalan "pelegalannya" lewat proses politik di kemudian hari. Sebab, peserta percakapan memiliki kedudukan politik strategis.

Ilusi akan kemewahan

Konsumsi barang-barang mewah sering dipandang sebagai usaha penciptaan nilai ekstra yang melekat pada cara memposisikan diri kalangan tertentu di tengah masyarakatnya. Semakin eksklusif suatu barang, semakin tidak masuk akal harganya, semakin prestisius barang itu sehingga dirasa mampu memberi posisi sosial yang tinggi bagi pemiliknya. Terutama sejak telaah Thorstein Veblen dalam *The Theory of Leisure Class* (1899), perilaku konsumsi tidak lagi dipandang semata dalam kerangka fungsi instrumental suatu barang, tetapi juga fungsi sosialnya. Veblen mengamati perilaku konsumsi barang-barang mewah oleh kelas penikmat Victorian kaya raya pada masa antara paruh kedua tahun 1800-an dan menjelang Perang Dunia I. Golongan ini merekayasa ilusi mengenai harga diri, kehormatan, dan status melalui kepemilikan properti yang istimewa. Di situ fungsi sosial dari konsumsi menciptakan identitas. Hasrat berkonsumsi ini mendorong orang untuk selalu mencari cara mempunyai properti yang memunculkan distingsi dirinya dari yang lain.

Kaum aristokrat tersebut adalah mereka yang mendapatkan surplus produksi dari gelombang revolusi

industri tahap kedua, saat temuan-temuan teknologi yang lebih canggih dari masa sebelumnya diterapkan secara luas pada sistem komunikasi telegraf, jaringan rel kereta api, pelayanan penyediaan air, dan semacamnya. Para penerima surplus produksi ini mempunyai kemampuan finansial yang besar, terutama berkat warisan, dan tanpa jerih payah seperti yang dialami kelas pekerja, padahal kelas pekerja inilah yang berkontribusi besar dalam terjadinya surplus produksi. Dengan lain kata, status sosial diperoleh hanya dari kepasifan diri, membuang waktu dan uang untuk menikmati kesenangan, dan bukan dari aktivitas bekerja.

Gaya hidup bermewah-mewah pada era Veblen berada dalam struktur masyarakat di mana penghisapan terhadap kelas pekerja terjadi. Namun, ilusi harga diri dengan mengkonsumsi barang mewah tersebut ternyata menular dan berlangsung pula pada level kelas pekerja. Ketika ilusi ini merebak ke semua kalangan dan diyakini premis-premisnya, termasuk keyakinan bahwa gaya hidup itu adalah ekspresi kebebasan dan hak pribadi, maka pembenaran terhadapnya pun meluas.

Meskipun penampilan para konsumen kemewahan tampak meyakinkan, setidaknya dari sudut pandang mereka sendiri, tetapi sebetulnya padanya pelemahan kekuatan-kekuatan manusia disemai dan disuburkan. Hal-hal yang substantif tergantikan oleh sensasi-sensasi yang memuaskan hasrat. Aneka barang dan perkakas mewah yang dilekatkan pada seseorang lalu menjadi tampak lebih penting dan menguasai perhatian ketimbang humanitas orang itu sendiri. Apa-apa saja yang dipandang bermakna dalam hidup dan membangun pengakuan sosial lebih ditentukan oleh segi-segi eksternal dari individu daripada hal-hal yang tumbuh dari dalam. Lebih lanjut, hal-hal yang mengancam humanitas dalam kehidupan bersama di mana para penikmat kemewahan itu hidup menjadi kabur bahkan hilang dari pandangan mata.

Dengan lain kata, sensasi yang muncul dari kemewahan mengaburkan aneka persoalan substantif yang dihadapi manusia. Bila kemewahan ini kemudian menjadi pilihan gaya hidup politikus, salah satu yang paling terancam olehnya adalah terdistorsinya pemaknaan akan "persoalan publik". Kepublikan yang terhubung dengan aspirasi dan kebutuhan aneka kalangan yang harusnya dilayani oleh politikus sebagai pejabat publik berpotensi terbelokkan oleh hasrat-hasrat primordial politikus itu sendiri sebagai sosok yang belum selesai mencari identitas diri dan pengakuan sosial.

Ningrat baru di era ketimpangan

Kasus mengenai mewahnya gaya hidup pejabat publik muncul juga antara lain di DPRD Jakarta. Dalam silang pendapat mengenai berapa besaran dana yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas, termasuk anggaran makan, anggota DPRD Jakarta, M. Taufik mengatakan di depan wartawan bahwa angka ratusan ribu tidak cukup untuk biaya makan. "Kalau uang makan itu masuk ke Rp 470.000 itu, kami kalau mau makan *lobster* enggak bisa," ujar wakil rakyat tersebut (*Kompas.com*, 14 Desember 2015). Masih mirip dengan ini, beberapa waktu sebelumnya tersiar kabar dari daerah bahwa biaya makan Bupati Simalungun, J. R. Saragih, adalah sebesar lebih dari Rp 25 juta per hari – seiring dengan adanya dugaan *mark up* anggaran (Tribunnews.com, 28 Juni 2015).

Bukan hanya perihal makan, kebiasaan para pejabat mengenakan arloji yang nilainya ratusan juta hingga miliaran rupiah juga menghenyakkan khalayak, termasuk arloji bermerk *Richard Mille* milik Setya Novanto yang sempat tersembul di lengannya saat bersalaman dengan Donald Trump dan disebut pemerhati jam jauh lebih mahal daripada arloji Presiden Obama dan Pangeran William (*Kompas.com*, 6 September 2015). Adapun berita tentang permintaan fasilitas dan penggunaan mobil mewah oleh anggota dewan perwakilan nyaris selalu muncul ke permukaan, hingga kompleks DPR, juga DPRD, kelihatan seperti *"showroom"* mobil mewah (Merdeka.com, 24 Agustus 2014).

Apa yang ditampilkan di ranah publik oleh para pejabat tersebut sungguh ironis di hadapan situasi rakyat kebanyakan, yakni:kemiskinan. Bank Pembangunan Asia (2015) misalnya mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di seputar angka 5% yang dialami Indonesia sejak 2010 terindikasi mampu mendorong sekitar 3,3 juta rakyat keluar dari kemiskinan. Namun, pada Maret 2014 diketahui bahwa jumlah mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan (atau yang pengeluaran bulanannya per orang di bawah Rp 300 ribu ke bawah) jumlahnya lebih dari 8 kali lipat angka keberhasilan itu atau kira-kira 28 juta jiwa. Sementara itu, sekitar 68 juta jiwa lainnya berada pada kondisi rawan miskin.

Menurut siaran pers Bank Dunia pada 8 Desember 2015, ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin membesar. Tingkat kemerataan distribusi pendapatan (koefisien gini) Indonesia sebesar 0,3 pada tahun 2000 dan 0,41 pada tahun 2013. Artinya, ada *trend*

peningkatan ketidakmerataan pendapatan di Indonesia. Lembaga riset Perkumpulan Prakarsa menghitung bahwa pada tahun 2008 akumulasi kekayaan dari 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 30 juta penduduk dan pada tahun 2011 melonjak menjadi setara dengan kekayaan 77 juta penduduk.

Perilaku para pejabat negara yang cenderung menghambur-hamburkan uang dan berkubang kemewahan sementara situasi rakyat masih banyak terjepit secara ekonomi membuat getir rasa. Duduknya para politikus pada posisi-posisi kenegaraan melalui jalan demokrasi demi hadirnya barisan pelayan rakyat rupa-rupanya malahan melahirkan *ningrat-ningrat* baru, semacam kelas tersendiri di tengah masyarakat, yang kehilangan rasa perasaan senasib sepenanggungan dengan rakyat kebanyakan.Gambaran ini menunjukkan sinyal kuat bahwa demokratisasi di Indonesia berjalan pada tataran superfisial. Perubahan-perubahan institusional penting pasca Orde Baru tidak serta merta mengubah perilaku dalam menjalankan kekuasaan politik. Program desentralisasi kekuasaan politik dan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak 2001, yang diharapkan semakin mendekatkan jarak antara lembaga negara dan rakyat, misalnya justru melahirkan para pemimpin lokal yang bertindak bak "raja-raja kecil" (Hofman dan Kaiser, 2002).

Tumbuhnya keningratan baru ini terpompa pula oleh masuknya *newcomers* pada wilayah lembaga-lembaga perwakilan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perubahan institusional mengenai cara terpilihnya seorang kandidat wakil rakyat dari sistem proporsional dengan daftar tertutup menjadi terbuka sejak 2009 menghasilkan nyaris 70 % pendatang baru di DPR RI, suatu jumlah yang bahkan tidak pernah terjadi di negara-negara demokrasi Barat (Ziegenhain, 2015). Kehendak untuk mencegah praktik-praktik *cronyism* lewat sistem proporsional dengan daftar tertutup dalam pemilihan anggota legislatif justru berujung tergusurnya politikus-politikus kawakan dan masuknya banyak sosok populer, misalnya pelawak dan aktris, yang miskin pengalaman dalam berpolitik.

Karya mural di Stadion Kridosono, Yogyakarta, 28 Maret 2016

Menguasai kursi, abai substansi

Terpinggirkannya kapasitas berpolitik oleh tingkat popularitas tersebut susah dilepaskan dari keberadaan parpol-parpol yang demi mempertahankan eksistensi tak jarang tergoda untuk menguasai sebanyak-banyaknya kursi di parlemen lewat cara apa pun, termasuk dengan mengandeng sosok-sosok populer sebagai caleg. Dengan mengingat kenyataan bahwa parpol-parpol pengusung kandidat cenderung berpusat pada sosok kuat dan dinastinya (Mietzner dan Aspinall, 2010), masuknya para pendatang

baru minim pengalaman dan kapasitas di dewan perwakilan menggambarkan terjadinya "pengerahan massa" para legislator di bawah kontrol sosok kuat yang menaunginya. Maka demokrasi yang ideanya berakar pada *demos* (rakyat) bergeser ke apa pun yang menjauh dari kerakyatan itu sendiri.

Pada fenomen ini mengemuka apa yang dipandang sebagai representasi dalam demokrasi yang menyimpan problematika tertentu (Pitkin, 1967). Konsep keterwakilan dalam demokrasi sifatnya interpretatif dan tidak mengandung makna tunggal sehingga berpeluang menghadirkan jarak antara *status* pada wakil rakyat yang dilahirkan oleh proses demokrasi dan *praktik* yang dijalankan oleh wakil tersebut di dewan perwakilan. Gap antara status dan praktik itu cenderung semakin lebar ketika para kandidat berlatar belakang yang kurang sepenuhnya sambung dengan kondisi sehari-hari rakyat kebanyakan, misalnya kalangan pengusaha terkenal dan selebritis. Mereka ini umumnya membawa gaya hidup sehari-hari berongkos besar yang bukan menjadi pilihan sehari-hari rakyat kebanyakan.

Ongkos besar sebetulnya tidak hanya perkara pembiayaan gaya hidup, tetapi proses masuknya para kandidat ke lembaga perwakilan itu sendiri sudah membutuhkan banyak uang. Sebab, dalam banyak kasus, suara pendukung harus dibeli. Maka hanya pihak-pihak yang tertopang kecukupan danalah yang berpeluang besar dalam transaksi-transaksi politik yang berlangsung. Tidak jarang para kandidat berlomba memperoleh dukungan dana ini dengan berbagai cara, termasuk melalui utang atau menjual harta bendanya. Perlombaan untuk mempunyai kecukupan dana rupa-rupanya juga melibatkan partai politik yang mengusung kandidat.

Hingga terjadi bahwa kursi-kursi perwakilan yang sudah dikuasai parpol dijadikan mesin untuk pengumpulan dana. Hal ini antara lain mencuat di awal Januari 2016 ketika selebriti Angelina Sondakh (Angie), mantan wakil rakyat dari Partai Demokrat, bersaksi untuk persidangan kasus korupsi Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Dalam sidang itu, Angie mengaku bahwa, karena diberikan janji akan dibebaskan dari iuran partai, dirinya selalu mengikuti perintah Nazaruddin untuk terus bekerja bagi partai, yang terbaca dengan mudah sebagai kerja meloloskan rupiah untuk partai dalam kerja-kerja dewan perwakilan. Disebut oleh Angie bahwa ada pembagian jatah untuk fraksi partainya, yaitu 20 % dari APBN 2009-2014, di mana partai mendapat 5 % (Tempo.com, 6 dan 7 Januari 2016).

Model kerja untuk partai dan bukan untuk rakyat seperti itu, sekali lagi,memperlebar gap antara status legislator di dewan perwakilan dan pekerjaan yang dimandatkan untuk dilakukan karena status itu. Dalam konstelasi ini, anak-anak demokrasi prosedural di Indonesia sulit melepaskan diri dari jerat persekongkolan politik terbatas yang mengejar kecukupan materi. Ketimbang sebagai sumbu pengharapan jalan-jalan demokrasi yang diasumsikan mampu mendorong terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial, kehadiran mereka cenderung ibarat sumbat bagi mengalirnya hikmat kebijaksanaan pada saluran-saluran mekanisme permufakatan. Praktik-praktik *politicking* yang dilakukan secara kolektif dengan menggunakan status mereka sebagai pejabat ditujukan untuk menghidupi koloni yang memberikan pernaungan buat mereka tersebut,dan hal ini menunjukkan praktik-praktik predator yang memakan hak warga negara. Fenomen munculnya predator politik ini bukan hanya terjadi di pusat negara, tetapi juga merambah sampai ke daerah-daerah, hingga lembaga negara di setiap lininya berubah menjadi serupa pasar yang riuh dengan negosiasi dan transaksi para elite untuk mengamankan kekuasaan demi tercapainya akses ekonomi yang mereka butuhkan (Dick dan Mulholland, 2011).

Bila aturan main yang mengatur proses politik dipandang kurang menguntungkan, kursi-kursi kekuasaan dipergunakan sedapat-dapatnya untuk memuluskan terjadinya perubahan undang-undang demi semakin terbukanya jalan demi diperolehnya kedudukan politik yang lebih menguntungkan. Hal ini terbaca pada prosespolitik saat terjadinya perubahan UU no 27/2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) menjadi UU no 17/2014 pada bulan Juli 2014 menjelang berakhirnya masa kerja parlemen 2009-2014.

Pada undang-undang yang baru, pimpinan DPR dipilih secara voting oleh anggota DPR dan bukan diberikan kepada partai politik pemenang pemilu legislatif. Maka legalitas diciptakan – termasuk dengan menutup mata pada kenyataan dari mana datangnya legitimasi – untuk mengawal kepentingan yang bila ditelusur lebih lanjut bersumber pada keinginan elite politik tertentu, yang cenderung berjangka pendek, daripada keinginan dan aspirasi rakyat banyak, yang lebih berjangka panjang. Setya Novanto sebagai ketua DPR adalah buah dari drama politik ini.

Maka kursi politik secara ajaib menjelma menjadi panggung bermain para pemburu rente daripada menjadi kekuasaan sakral yang aktif untuk mewujudkan cita-cita konstitusi, atau menjadi ruang kontemplasi dan aksi etika bernegara. Di situ getar amanat penderitaan rakyat melenyap, dan mulianya kedudukan politik yang lahir dari proses demokrasi sirna. Laporan lembaga riset demokrasi dan HAM, Demos, (2004) menyebutkan bahwa demokratisasi di Indonesia pascareformasi telah dibajak oleh elite Orde Baru dan elite baru yang muncul setelah Orba tumbang. Dalam catatan lembaga ini, "di tengah sistem yang masih tetap korup, kelompok elite itu menjalankan kepentingan mereka melalui mekanisme dan prosedur 'demokrasi'".

Tentu saja tidak semua wakil rakyat berkarakter seperti yang diutarakan di atas. Ada juga wakil wakil rakyat yang masih memegang idealisme. Namun, berada dan bekerja di lingkungan dan sistem yang di sana-sini masih korup, politisi idealis cenderung tersingkir atau malahan ketularan virus yang mematikan terwujudnya demokrasi substansial. Bahkan, pengungkapan kasus-kasus korupsi oleh KPK sejak didirikan pada tahun 2002 yang menyentuh ratusan pejabat negara dan ancaman jeruji penjara sepertinya tidak menimbulkan efek jera.

Liputan media massa, termasuk melalui media sosial, mengenai kasus-kasus korupsi itu yang memungkinkan publik luas mengetahui dan menyimak perilaku korup para politisi tidak pula meningkatkan urat malu. Justru tampak bahwa cara korupsi semakin berwarna-warni, lihai, dan canggih. Ibaratnya, keterampilan *maling* justru semakin maju untuk menghindari jeratan hukum saat kegagalan untuk menjalankan pencurian semakin diekspos.

Kegigihan para pemain politik dan pejabat negara yang didukung orang-orang dekatnya untuk mendapatkan atau mempertahankan status yang diperoleh dari proses politik yang menghasilkan legalitas tetapi minus praktik yang harusnya dijalankan tersebut sesungguhnya mengungkapkan lanskap cara berada *(way of being)* politisi lengkap dengan kebatinan gerombolan yang gemar memalsukan keadaan demi selamatnya maksud-maksud tersembunyi. Kepalsuan dan manipulasi dalam panggung kekuasaan politik ini mengingatkan orang pada golongan sofis dalam sejarah filsafat Yunani kuno yang mengincar uang milik orang yang mendapatkan pengajaran dari mereka. Awalnya kaum sofis adalah sebutan prestisius bagi cendekiawan dan orang-orang bijaksana, tetapi kaum ini kemudian memperoleh reputasi buruk karena tindakan mereka melenceng dari etika dan keutamaan. Status sebagai orang bijak mereka jadikan kedok untuk memuaskan hasrat memperkaya diri. Dalam bahasa Inggris, terdapat kata *"sophistry"* yang terhubung dengan orang ber-kelihaian berkata-kata tetapi dengan argumentasi yang meleset dari kebenaran.

Koloni penikmat di jagat media

Munculnya ningrat baru berjejaring di jantung lembaga negara yang cenderung bekerja untuk kelompoknya sendiri dan bersikeras mempertahankan posisi politik dengan cara-cara yang tak jarang abai pada prinsip-prinsip etika menciptakan suasana kondusif untuk surutnya nilai-nilai kontrak sosial dan terbangunnya koloni-koloni penikmat hasil demokratisasi. Pada titik ini, universalitas makna kepublikan sebagai basis untuk keputusan-keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak *gembos* ke arah partikularitas. Pada gilirannya kuasa-kuasa politik di tangan mereka berpotensi mendistorsi visi-visi demokrasi dan mengancam usaha-usaha perwujudan kebebasan dan kesetaraan, pun pula kesejahteraan dan keadilan dalam hidup bersama.

Halnya semakin jelas bila kepublikan di sini dimaknai seperti yang disampaikan Jurgen Habermas dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (1991), yakni partisipasi warga dalam membicarakan persoalan-persoalan publik, di mana (1) aktornya adalah orang-orang yang memiliki otonomi, (2) tindakannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional yang menjawab kegelisahan politis warga demi terjadinya perubahan, dan (3) prosesnya merupakan mediasi isu-isu privat dari berbagai kalangan berbeda yang diatasi dengan menemukan apa yang sesungguhnya menjadi kepentingan publik.

Kepublikan semacam itu, menurut Habermas, menjadi hancur karena terjadinya "refeodalisasi", saat arena diskursus kewargaan berubah menjadi panggung representasi status para elite di bawah payung hegemoni pasar atas demokrasi. Hal ini terjadi tatkala warga negara hadir secara pasif di luar arena pembicaraan mengenai hidup dan masa depannya, serta hanya menjadi penonton terhadap upaya-upaya pembentukan aspirasi publik yang sudah dikuasai oleh para petugas partai dan diperkeruh oleh kehebohan pertarungan di dalam dan di antara partai-partai itu sendiri (bdk. Hardiman, 2010).

Habermas masih menambahkan bahwa situasi mengkerutnya kepublikan tersebut terdukung sepenuhnya di era informasi dan komunikasi oleh kehadiran media

massa, yang telah menjadi instrumen "kolonisasi" atas dunia hidup oleh sistem pasar dan kekuasaan, di mana dengannya pendiktean opini publik berlangsung. Di situ aspirasi otentik masyarakat warga tidak tercermin dalam opini publik, sebab persepsi mengenai realitas hidup diarahkanuntuk mengabdi kepentingan elit yang berjejaring dengan sesama elit lainnya. Dengan lain kata, masyarakat warga ditempatkan sebagai konsumen yang pasif menerima wacana yang dibentuk, dan melalui mekanisme tersebut kekuatan-kekuatan masyarakat warga untuk memproduksi wacana yang dikehendakinya sendiri dilolosi. Hingga, individu-individu dan aneka kelompok masyarakat berangsur-angsur memahami diri mereka sendiri dan aspirasi mereka di bawah pengaruh terminologi dan citarasa yang sudah disediakan oleh sistem pasar dan kekuasaan, serta memandang diri sendiri sebagai konsumen dan *client* (Habermas, 1987).

Modus kolonisasi itu dalam konteks demokratisasi di Indonesia tergambarkan pada kondisi aktual dunia per-media-massa-an Indonesia yang dikontrol oleh grup-grup media yang dimiliki elit tertentu yang terhubung dengan parpol. Contohnya adalah grup *Visi Media Asia* yang tak bisa dilepaskan dari sosok Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, dan *Media Group* dengan Surya Paloh, pendiri dan Ketua Umum Partai NasDem. Dalam pertarungan kursi presiden antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 misalnya terlihat bagaimana kiprah aneka media massa pendukung masing-masing kandidat berebut membangun opini publik demi mencapai tujuan kelompoknya, dengan usaha-usaha yang tidak sepi dari praktik-praktik manipulasi. Sempat muncul di pemberitaan, stasiun TV One dari grup Visi Media Asia yang mendukung Prabowo dan stasiun Metro TV dari Media Group yang mendukung Jokowi direkomendasikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk dicabut izin penyelenggaraan penyiarannya karena kedua stasiun televisi itu dinilai menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik peserta Pemilu Presiden 2014 (Kompas.com, 13 Juli 2014).

Melalui media, dengan alasan tranparansi, aktivitas-aktivitas lembaga negara juga tersampaikan kepada khalayak sehingga mereka dapat melihat aktivitas-aktivitas itu di depan mata. Acara-acara peluncuran program pembangunan, peresmian proyek-proyek, atau kunjungan kerja pejabat memperoleh semacam *"stage of performance"* lewat media. Di sana juga bisa muncul peristiwa pemberian bantuan oleh pejabat kepada korban saat terjadi bencana alam dan semacamnya, lengkap dengan momen bersalaman dan foto bersama. Bahkan, tayangan penanggulangan aksi-aksi terorisme dan kejahatan narkotikadiwartakan sebagai kehadiran negara di tengah persoalan warga.

Semuanya ini menunjukkan betapa, lewat media yang mereproduksi imaji terus-menerus, gambaran tertentu mengenai negara disodorkan kepada massa, dan pada waktu yang sama *feeling* dan opini rakyat banyak mengenai negara terbimbing oleh paket-paket pewartaan itu. Gambaran tentang negara lewat media ini berangsur-angsur menjadi identitas negara, dan terhadap identitas ini rakyat penonton berangsur-angsur melihat posisi mereka sendiri, maka terbentuklah pada konstelasi antaridentitas ini: relasi sekaligus jarak. Selama identitas negara semakin digantungkan pembentukannya pada imaji-imaji dalam media itu, apa-apa yang nyata (yakni: di luar media) semakin dinilai kurang bermakna, dan pada gilirannya, apa yang tersisa di dalam kepala adalah ilusi tentang identitas negara.

Perkawinan kuasa politik dan kapital yang mengontrol media oleh jaringan elite demi terpeliharanya akses ke sumber-sumber ekonomi sesungguhnya lalu membentuk negara berskema demokrasi kapitalis. Dan, ilusi tentang negara dibutuhkan oleh negara demokrasi kapitalis untuk menjaga eksistensinya sebab pada tindakan berstatus "tindakan negara" untuk menangani persoalan-persoalan publik terkandung motif dan praktik untuk memuaskan hasrat-hasrat privat aktor-aktor berkepentingan di wilayah negara (bdk. Chomsky, 1989). Maka, ketika hal-hal privat dari pejabat negara bocor ke arena yang dapat diakses publik, seperti kasus rekaman percakapan yang diputar di sidang MKD, karakter asasi dari kepublikan dari tindakan-tindakan aparatus lembaga negara tergugat. Apalagi terpapar di sana bahwa aparatus tersebut dan lingkungan dekatnya gemar kemewahan danbertindak sembunyi-sembunyi di luar tugas dan kewenangannya.●

In Nugroho Budisantoso,
pengajar dan koordinator Lingkar Studi di Universitas Sanata Dharma.

RUJUKAN

Aji, P., 2015,"Summary of Indonesia's Poverty Analysis," ADB Papers on Indonesia, no. 04, Oktober 2015,

Manila: Asian Development Bank, dapat diakses pada:http://www.adb.org/sites/default/files/publication/177017/ino-paper-04-2015.pdf

Budiantoro, S., 2014, "Pertumbuhan Tanpa Pembangunan," dapat diakses pada: http://theprakarsa.org/new/in/news/detail/435/Pertumbuhan-Tanpa-Pembangunan

Chomsky, N., 1989, *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies*, London: Pluto Press

Demos, 2004, "Demos: Masalah dan Pilihan Demokratisasi," dalam*Tempo*, 10 Oktober 2004, hlm. 65-76

Dick, H dan J. Mulholland, 2011, "The State as Marketplace: Slush Funds and Intra-elite Rivalry," dalam E. Aspinall dan G. van Klinken (eds.), *The State and Illegality in Indonesia*, Leiden: KITLV Press, hlm. 65-85

Habermas, J., 1991 [1962], *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press

_____, 1987 [1981], *The Theory of Communicative Action. Volume 2. Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, Boston: Beacon Press

Hardiman, F. B., 2010, "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas," dalam F. B. Hardiman (ed.), *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari* Polis *sampai* Cyberspace, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 185-200

Hofman, B. dan K. Kaiser, 2002, "The Making of the Big Bang and its Aftermath: A Political Economy Perspective," Paper, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, U. S., 1-3 May 2002

Kompas.com, 2015, "Taufik: Kalau Uang Makan Masuk ke Rp 470.000, Kami Enggak Bisa Makan Lobster," 14 Desember 2015, dapat diakses pada: http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/14/14015871/Taufik.Kalau.Uang.Makan.Masuk.ke.Rp.470.000.Kami.Enggak.Bisa.Makan.Lobster

_____, 2015, "Pemerhati Jam: Arloji Setya Novanto Lebih Mahal dari Arloji Obama-Pangeran William," 6 September 2015, dapat diakses pada:*http://nasional.kompas.com/read/2015/09/06/15064881/Pemerhati.Jam.Arloji.Setya.Novanto.Lebih.Mahal.dari.Arloji.Obama-Pangeran.William*

_____, 2014,"Pemerintah Didesak Cabut Izin Siar "Metro TV" dan "TV One"," 13 Juli 2014, dapat diakses pada: http://nasional.kompas.com/read/2014/07/13/19220901/pemerintah.didesak.cabut.izin.siar.metro.tv.dan.tv.one

Merdeka.com, 2015, "Tak Kalah dengan Senayan, DPRD DKI Jadi *Showroom* Mobil Mewah," 26 Agustus 2014, dapat diakses pada: http://www.merdeka.com/jakarta/tak-kalah-dengan-senayan-dprd-dki-jadi-showroom-mobil-mewah/keluarga-lulung-naik-jeep-rubicon.html

Mietzner, M. dan E. Aspinall, 2010, "Problems of Democratisation in Indonesia: An Overview," dalam E. Aspinall dan M. Mietzner (eds.), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, hlm. 1-20

Pitkin, H. F., 1967, *The Concept of Representation*, Berkeley: University of California Press

Tempo.co, 2016, "Ini Reaksi Demokrat Setelah Ibas Disebut Tahu Korupsi Nazaruddin," 7 Januari 2016, dapat diakses pada: http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/07/078733896/ini-reaksi-demokrat-setelah-ibas-disebut-tahu-korupsi-nazaruddin

_____, 2016, "Angelina Sondakh: Saya Sudah Jadi Debu di Atas Keset," 6 Januari 2016, dapat diakses pada: http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/06/063733559/angelina-sondakh-saya-sudah-jadi-debu-di-atas-keset

Tribunnews.com, 2015, "Biaya Makan Bupati Simalungun Rp 25 Juta Per Hari," 28 Juni 2015, dapat diakses pada: http://medan.tribunnews.com/2015/06/28/biaya-makan-bupati-simalungun-rp-25-juta-per-hari

The World Bank, 2015, "Indonesia: Rising Inequality Risks Long-Term Growth Slowdown," Press Release, 8 Desember 2015, dapat diakses pada: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/12/08/rising-inequality-risks-long-term-growth-slowdown

Veblen, T., 2007, *The Theory of the Leisure Class*,Edited with An Introduction and Notes by Martha Banta, Originally Published [1899], Oxford: Oxford University Press

Ziegenhain, P., 2015,*Institutional Engineering and Political Accountability in Indonesia, Thailand and the Philippines*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies